



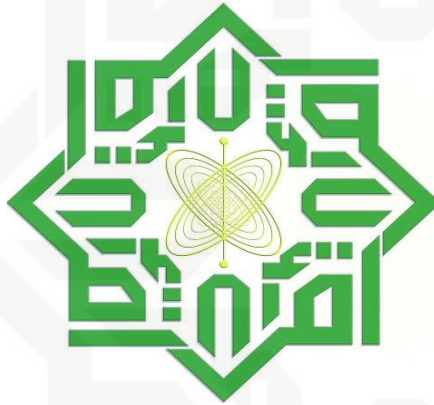
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ADAT BATAK TOBA (Study Kasus Desa Sumber Sari)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat
 Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH

HOTMA IDA Br. SIMAMORA

NIM: 11721200647

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHDAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT BATAK TOBA”**, yang ditulis oleh :

NAMA : HOTMA IDA BR. SIMMORA

NIM : 11721200647

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2021

Pembimbing Skripsi,

ADE FARIZ FAHRULLAH, M.Ag
NIP. 19671112 200501 1 006

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ADAT BATAK TOBA (Studi kasus di Desa Sumber Sari) ”**, yang ditulis oleh:

Nama : **HOTMA IDA Br. SIMAMORA**
 NIM : **11721200647**
 Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 14 Juli 2021**
 Waktu : **08. 00 WIB**
 Tempat : **Ujian Oline**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, M.A

Sekretaris
Mutasir, M.Sy

Penguji I
Dr. Aslati, M.Ag

Penguji II
Drs, Arifuddin, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ADAT BATAK TOBA (study kasus Desa Sumber Sari)

**Oleh :
Hotma Ida Br. Simamora**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Batak Toba dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba. Penelitian ini bertujuan untuk masyarakat batak yang menganut agama islam agar dapat memahami cara pembagian harta warisan sesuai dengan ajaran islam. Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*), maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Sebagai data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh adat dan masyarakat Batak Toba di Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan bahan seperti buku yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum waris adat Batak Toba. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah deduktif kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu sama lainnya, sehingga akhirnya akan memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di temukan bahwa pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Batak Toba hanya diperuntukkan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan tersebut. Karena anak perempuan di anggap akan mendapatkan warisan bila sudah besar dan telah menikah, maka dari pihak suaminya anak perempuan tersebut akan mendapatkan warisan. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena pembagian harta warisan menurut adat Batak Toba sangat bertentangan sekali dengan hukum Islam yang dijelaskan dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 11 dan 12.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Syayidul Mustofa* baginda kita Rasulullah Muhammad saw. Semoga syafaat beliau dapat kita rasakan di Yaumul Akhir nanti, Aamiin.

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan kaum muslimin pada umumnya, terutama pada diri penulis sendiri. Semoga dengan tersusunnya skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Batak Toba”**, tidak hanya menambah khazanah keilmuan, namun segala kebaikan yang terdapat didalamnya juga dapat kita amalkan hendaknya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dimasa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dimasa yang akan datang.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak baik moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Salam cita dan sayang kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah berkorban moril dan materil dan tidak pernah bosan memberikan do'a restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu pengetahuan. Jasa dan pengorbanannya tidak dapat dibalas dengan apapun, hanya Allahlah yang membalasnya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Plt.Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyiyah) dan Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag, sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M. Ag, selaku Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
6. Para bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas belajar berupa buku-buku rujukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada perangkat Desa Sumber sari sekaligus informan yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi.
9. Terimakasih untuk adik tercinta yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Tulang dan Nantulang saya yang telah memberikan doa dan dukungan serta memberikan semangat dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu pengetahuan.
11. Terimakasih kepada amangboru dan bou yang telah memberikan doa, dukungan dan ilmu pengetahuan pada penulisan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Reynaldi Sirait yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Dan terimakasih kepada sahabat dan teman yang tercinta yang telah memberikan doa, dukungan serta memberikan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga mendapat imbalan yang lebih dari apa yang telah diberikan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi usaha Penulis, *Aamiin ya Rabbal 'Alamin*.

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis

HOTMA IDA Br. SIMAMORA
NIM. 11721200647

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	13
B. Struktur Pemerintahan Desa Sumber Sari.....	14
C. Kondisi Pendidikan	15
D. Kehidupan Beragama	16
E. Sosial Ekonomi Masyarakat.....	17
F. Adat Istiadat.	18
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Waris	21
B. Dasar-Dasar Hukum Waris	23
C. Asas-Asas Waris	27
D. Rukun dan Syarat Waris.....	30
E. Sebab Mendapat Waris.....	32
F. Sebab Halangan Menerima Warisan	35
G. Macam-Macam Ahli Waris	36
H. Bagian-Bagian Waris	40

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Wasiat	45
J. Pengertian Urf (Adat)	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba	47
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Batak Toba.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran.	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Penduduk Desa Sumber Sari	14
Tabel II.2	Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Sumber Sari	16
Tabel II.3	Klasifikasi Penduduk Desa Sumber Sari Berdasarkan Jenis Agama dan Penganutnya	17
Tabel II.4	Jumlah Sarana Keagamaan Desa Sumber Sari	17
Tabel II.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	18
Tabel II.6	Komposisi Penduduk Desa Sumber Sari Berdasarkan Suku .	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Struktur Pemerintahan Desa Sumber Sari Tahun 2021.....	15
--	----





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*al-ahwalus syahsiah*) sangat penting dipelajari supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam, maka bagi umat Islam akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh *muwarris* (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (pasal 171 a).²

Pada dasarnya hukum kewarisan itu bersumber pada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang telah ditentukan Rasulullah. Baik di dalam al-Qur'an maupun Hadits - Hadits Rasulullah di dalam hukum kewarisan itu sudah secara tegas mengatur dan juga ada yang secara tersirat bahkan juga ada yang hanya berisikan pokok-pokoknya saja. Dalam al-Qur'an ada ayat-ayat yang mengatur masalah kewarisan Islam tersebut di antaranya surat an-Nisa ayat 7:

¹ Sirman Dahwal, *Hukum Kewarisan Indonesia yang di Cita-Citakan*, (Bandung: Mandar Maju, 2020), h. 14

² *Ibid*, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa: 7)*

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.³ Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Karena setiap manusia dalam kehidupannya pasti akan mengalami peristiwa hukum dimanapun dia berada, yang merupakan peristiwa hukum yang disebut meninggal dunia. penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut di atur oleh hukum.

Bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses ini telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi *akuut* oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak

³ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Mawaris)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 290

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁴

Menurut pendapat Soepomo, hukum kewarisan adat yaitu peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta melimpahkan kepemilikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

Jadi, pengertian hukum kewarisan adat itu adalah sekumpulan aturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta warisan dari si pewaris kepada ahli warisnya, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun hak-hak kebendaan.⁵

Dalam hukum adat dikenal tiga macam sistem kekerabatan atau prinsip garis keturunan (*principle of descent*) yang mana masing-masing sistem kekerabatan akan berpengaruh pada bagian waris masing-masing ahli waris.

Sistem kekerabatan dalam hukum adat, antara lain :

1. Sistem Patrilineal

Sistem patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem kekerabatan patrilineal atau dikenal dengan garis keturunan bapak, ahli waris hanyalah anak laki-laki, anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris, sehingga anak perempuan bukan penerus harta bapaknya. Dalam sistem kekerabatan patrilineal dikenal adanya “kesatuan harta”, yaitu harta asal, harta bawaan,

⁴ Soerjono soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta pencarian atau bersama atau gono gini “dikuasai” oleh suami, karena adanya “perkawinan jujur”, yang dapat diartikan dengan “membeli marga kekerabatan” seorang calon istri untuk ditarik dalam marga calon suami, seolah-olah marga si wanita tersebut dibeli oleh kerabat pria agar masuk dalam marganya setelah melangsungkan perkawinan, sehingga calon istri tersebut masuk kekerabatan suami dan putus marga yang dipegangnya dan melebur kepada marga suami.

2. Sistem Matrilineal

Sistem matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Penerus keturunan adalah perempuan, namun ahli waris adalah semua anak baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari harta ibu.

3. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem parental atau bilateral yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.⁶

Perempuan Batak Toba sebagai salah satu pihak yang bersangketa dalam perkara waris karena beberapa hal. *Pertama*, nilai-nilai dan konsep budaya mengenai perempuan dan laki-laki pada masyarakat Batak Toba, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan, menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, khususnya dalam hal waris. *Kedua*, ketiadaan factor teritorial di kota tidak menyebabkan

⁶ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa warisan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

berkurangnya keberlakuan nilai-nilai budaya yang berdampak pada lemahnya kedudukan perempuan dalam hal waris.⁷

Kebudayaan batak toba berakar pada sistem kekerabatan patrilineal dan mengikat anggota-anggotanya dalam hubungan triadic, yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu*, yaitu hubungan antara *lineage* yang berasal dari kelompok kekerabatan tertentu dalam satu marga. Dalam berhubungan dengan orang lain, orang Batak menempatkan dirinya dalam susunan *Dalihan Na tolu* tersebut, sehingga mereka selalu dapat mencari kemungkinan adanya hubungan kekerabatan di antara sesamanya (*martutur, martarombo*).

Secara kultural konseptualisasi Batak Toba mengenai anak mengacu hanya kepada anak laki-laki, dan bukan perempuan. Dampak dari hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan ini adalah hanya anak laki-laki yang mempunyai hak waris atas tanah, dan perempuan tidak mempunyai hak semacam itu.⁸

Konsekuensi dari sistem patrilineal dalam kewarisan adalah anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris dalam keluarga. Anak perempuan hanya dapat menikmati atau menguasai harta peninggalan pewaris jika diberikan sebagai pemberian (*pangusean*) dari saudara laki-lakinya dan juga perempuan akan mendapatkan warisan dari orang tua suaminya atau dengan kata lain mendapatkan secara diberi atau pemberian.⁹

⁷ Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 2

⁸ *Ibid*, hal. 9

⁹ Latus, Masyarakat Batak Toba, wawancara, Selasa, 27 Oktober 2020, pukul 19 : 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak orang Batak Toba yang memeluk agama Islam, yang mana dalam Hukum Islam menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). (QS. An-Nisa: 11).

Kedudukan tersebut tidak hanya terbatas kepada anak perempuan saja, akan tetapi istri juga. Dalam hukum adat Batak bahwa isteri yang ditinggalkan oleh pewaris tidak berhak untuk menguasai hartanya, seorang isteri yang ditinggalkan oleh pewaris hanya diperkenankan menikmati dan memelihara harta peninggalan pewaris, itupun selama isteri yang ditinggalakan tersebut masih dalam ikatan yang sama atau tidak menikah lagi. Jika isteri yang ditinggalakan tersebut menikah lagi maka istri tidak berhak menguasai atau mendapatkan harta peninggalan pewaris, maka harta tersebut diserahkan kembali kepada keluarga atau saudara kandung pewaris, yakni saudara laki-laki.¹⁰

Setelah survey awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa peneliti menemukan kasus seorang wanita keberatan terhadap pembagian harta warisan yang terjadi dalam keluarganya dimana seorang anak perempuan ini

¹⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keberatan karena tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua nya sehingga ia menjual harta warisan tersebut dan dibawa pergi oleh anak perempuan tersebut.¹¹

Hal ini menunjukan bahwa peroses pembagian harta warisan adat Batak Toba tidak sesuai dengan peroses pembagian yang sudah diatur dengan hukum Islam. Untuk mengetahui apakah sistem warisan menurut adat Batak Toba ini sesuai atau tidak dengan ketentuan yang sudah diatur jelas di dalam hukum Islam tentang sistem pembagiannya dengan jelas. Maka hal ini merupakan masalah yang menarik dan penting untuk di adakan penelitian, membahas lebih lanjut sebagai judul skripsi dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Batak Toba.”*

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Batak Toba ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba?

¹¹ Yati. simanjuntak, *masyarakat batak* , 13 April 2021

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui cara pembagian harta warisan di masyarakat Batak Toba.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba.

2. Manfaat penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini berguna untuk masyarakat batak yang menganut agama islam agar dapat memahami cara pembagian harta warisan dalam islam.
- c. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan akan menambah ilmu di khazanah pengetahuan mengenai pembagian harta warisan di dalam masyarakat Batak Toba.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah tokoh adat Batak, penelitian persepsi masyarakat tentang pembagin harta warisan dalam adat Batak Toba.

Adapun infroman penelitian tiga orang yang terdiri dari dua orang masyarakat batak dan satu orang toko adat Batak Toba.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh adat dan masyarakat Batak Toba di Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan bahan seperti buku yang berhubungan dengan

tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum waris adat Batak Toba.

- c. Data Tersier, yaitu merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan sekunder. Data ini di peroleh melalui kamus, insiklopedia, dan lain sebagain yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya.
- b. Wawancara, wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.¹³
- c. Studi pustaka, yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.
- d. Dokumentasi, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sejumlah besar informasi atau data yang tersimpul dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagai pelengkap dari hasil wawancara dan observasi.

¹³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hal. 372

¹⁴ Sugiyono, *opcit*, hal. 240

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penelitian deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu sama lainnya, sehingga akhirnya akan memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Teknik Penulisan

Deskriptif, yaitu statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Demikian untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁵ Sugiyono, *ibid*, hal. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari kondisi geografis dan demografis, struktur pemerintahan Desa Sumber Sari, kondisi pendidikan, kehidupan beragama, sosial ekonomi masyarakat, dan adat istiadat.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini terdiri dari pengertian waris, dasar-dasar hukum waris, asas-asas waris, rukun dan syarat waris, sebab halangan menerima waris, macam-macam ahli waris dan bagian-bagian waris.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang terdiri dari pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Batak Toba dan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis Desa Sumber Sari merupakan desa yang termasuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Penduduk Desa Sumber Sari dapat dikatakan sebagai komunitas yang heterogen dari berbagai sisi. Adapun jarak Desa Sumber Sari dengan Ibukota Kecamatan sebagai pusat pemerintahan ± 35 Km, Ibukota Kabupaten ± 70 Km, sedangkan dengan Ibukota Propinsi ± 110 Km, secara geografis Desa Sumber Sari berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinama Nenek
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Ramai
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kusau
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Kemuning

Luas wilayah Desa Sumber Sari adalah 400 hektar di mana 70% berupa lahan perkebunan. Iklim Desa Sumber Sari sama dengan desa-desa lain yang berada di wilayah Kampar mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Disini juga terdapat sarana dan prasarana transportasi yang cukup lancar seperti, sepeda motor, mobil, travel dan lain sebagainya. Jalan yang lancar menjadi penunjang yang menghubungkan antara Desa Sumber Sari dengan desa-desa lainnya.¹⁶

¹⁶ Sumber: *Profil Desa Sumber Sari*

Desa Sumber Sari Masih memiliki jumlah 788 Kepala Keluarga (KK) dari jumlah penduduk 4.990 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.145 jiwa, perempuan 2.845 orang yang terbagi dalam 4 (empat) dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Desa Sumber Sari

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa
1	Dusun I	1.585
2	Dusun II	995
3	Dusun III	970
4	Dusun IV	1.440
Jumlah		4.990

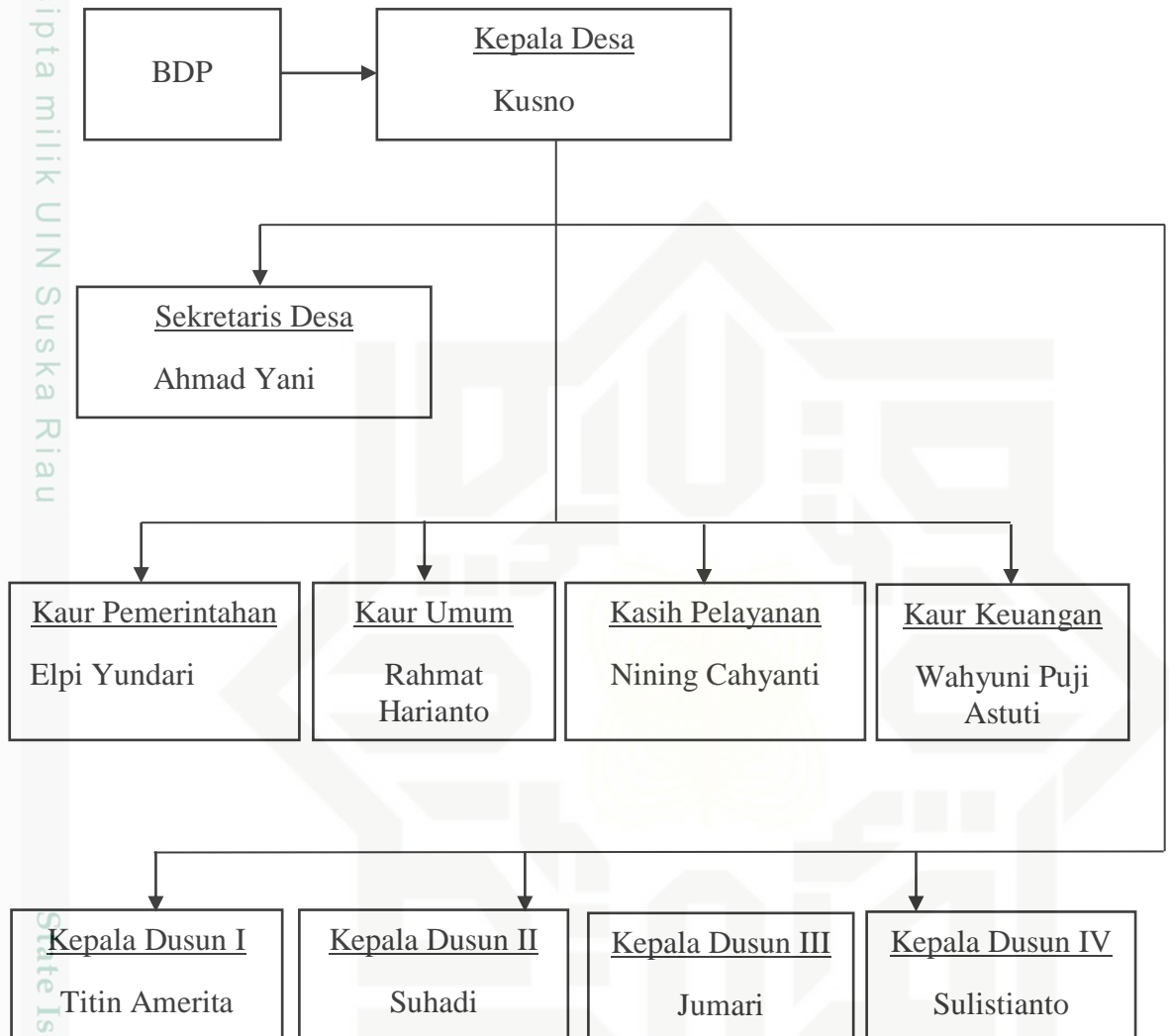
Sumber Data: Kantor Desa Sumber Sari Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk yang berdomisili di Desa Sumber Sari memiliki empat dusun yang terdiri dari Dusun I yang terdiri 1.585 jiwa, Dusun II terdiri 995 jiwa, Dusun III terdiri 970 jiwa dan Dusun IV terdiri dari 1.440 jiwa.

B. Struktur Pemerintahan Desa Sumber Sari

Struktur dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai alat yang akan memberikan gambaran mengenai satuan-satuan kerja dan hubungan-hubungan tanggung jawab baik secara vertical maupun secara horizontal, dengan kata lain struktur dapat mencerminkan hubungan kerja antar tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Struktur pemerintahan Desa Sumber Sari dituntut untuk bekerja secara profesional maupun dalam melayani masyarakatnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu struktur yang tepat sehingga target yang diinginkan akan dapat tercapai.

Gambar 2.1.
Struktur Pemerintahan Desa Sumber Sari Tahun 2021



Sumber Data: Kantor Desa Sumber Sari Tahun 2021

C. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Sumber Sari bisa dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II.2
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Sumber Sari

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	1
2	TPA/MDA	1
3	Sekolah Dasar Negeri	1
4	SMP Negeri	1
Jumlah		4

Sumber Data: Kantor Desa Sumber Sari Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Sumber Sari terdapat 1 unit Taman Kanak-kanak, 1 unit TPA/MDA, 1 unit Sekolah Dasar dan 1 unit SMPN. Desa Sumber Sari sarana pendidikannya tidak memadai, menyebabkan tingkat pendidikan penduduknya masih rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya penduduk yang tidak tamat sekolah.

D. Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, di mana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dijadikan petunjuk dan tuntunan di dalam kehidupan manusia. Adapun agama yang ada di Desa Sumber Sari dapat dilihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3
Klasifikasi Penduduk Desa Sumber Sari
Berdasarkan Jenis Agama dan Penganutnya

No	Jenis Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	4.250	90.13
2	Kristen	640	9.87
Jumlah		4.990	100

Sumber Data: Kantor Desa Sumber Sari Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sumber Sari yaitu: agama Islam sebanyak 4.250 jiwa dengan persentase 90.13%, agama Kristen sebanyak 640 jiwa dengan persentase 9.87%. Adapun sarana beribadah yang berada di Desa Sumber Sari dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.4
Jumlah Sarana Keagamaan Desa Sumber Sari

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushollah	1
Jumlah		3

Sumber Data: Kantor Desa Sumber Sari Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sarana keagamaan yang berada di Desa Sumber Sari hanya 3 unit masjid, 1 mushollah, sedangkan sarana beribadah agama lainnya tidak ada.

E. Sosial Ekonomi Masyarakat

Desa Sumber Sari merupakan wilayah daratan, yang dikenal dengan daerah perkebunan. Penduduk Desa Sumber Sari mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Namun sebagian besar dari penduduk Desa

Sumber Sari adalah sebagai petani. Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Sumber Sari dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	632	40.10
2	Pedagang	19	1.20
3	Guru PNS dan Honor	35	2.22
4	Buruh	324	20.55
5	TNI/POLRI	12	0.76
6	Supir	39	2.47
7	Lain-lain	203	12.88
Jumlah		1.576	100

Sumber Data: Kantor Desa Sumber Sari Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Sumber Sari berdasarkan pekerjaannya adalah: petani sebanyak 632 jiwa dengan persentase 40.10%, pedagang sebanyak 19 jiwa dengan persentase 1.20%, Guru PNS dan Honor sebanyak 35 jiwa dengan persentase 2.22%, buruh sebanyak 324 jiwa dengan persentase 20.55%, TNI/POLRI sebanyak 12 jiwa dengan persentase 0.76%, Supir sebanyak 39 jiwa dengan persentase 2.47%, dan pekerjaan lainnya sebanyak 203 jiwa dengan persentase 12.88%.

F. Adat Istiadat

Budaya suatu wilayah merupakan pencerminan dari adat istiadat yang terkait dengan kehidupan manusia dalam dimensi sosial dan diperoleh dari hasil kajian serta kreasi manusia. Oleh karena itu, budaya suatu daerah sangat erat hubungannya dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Adat istiadat itu pada dasarnya beraneka ragam sesuai dengan apa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang dilakukan masyarakat itu sendiri dalam kehidupan mereka, dengan kata lain adat istiadat masyarakat terdiri dari berbagai ragam budaya yang dianut dan diteruskan melalui kegiatan mereka sehari-hari.

Implikasi keragaman suku menyebabkan adat istiadat suatu daerah banyak dipengaruhi oleh aneka ragam suku yang mendiami daerah tersebut. Apabila komposisi masyarakat bersifat homogen, biasanya adat istiadatnya tidak begitu beraneka ragam. Namun demikian apabila masyarakat heterogen, maka adat istiadat yang dimiliki masyarakat tersebut akan mengalami asimilasi budaya. Masyarakat Desa Sumber Sari dapat dikatakan heterogen karena terdiri dari berbagai suku. Keragaman suku ini memberikan corak budaya yang cukup beragam, untuk lebih jelasnya keragaman suku di Desa Sumber Sari dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.6
Komposisi Penduduk
Desa Sumber Sari Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Jawa	3.210	63.68
2	Batak	640	30.20
3	Melayu	396	3.07
4	Minang	494	1.86
5	Lainnya	250	0.42
Jumlah		4.990	100

Sumber Data: Desa Sumber Sari Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Sumber Sari terdiri dari suku Jawa sebanyak 3.210 jiwa dengan persentase 63.68%, suku Batak sebanyak 640 jiwa dengan persentase 30.20%, suku Melayu sebanyak 396 jiwa dengan persentase 3.07%, dan suku Minang 494 jiwa

dengan persentase 0.86% sedangkan suku lainnya sebanyak 250 jiwa dengan persentase 1.42%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *al-mirath*, dalam bentuk masdar dari kata *waritha-yarithu-wirthan-mirathan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹⁷ Ilmu yang mempelajari waris disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *fariḍah*, yang diartikan oleh para ulama' *farriḍiyun* semakna dengan kata *mafrūḍah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹⁸ Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.¹⁹

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.²⁰ Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau

¹⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 33

¹⁸ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 11

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 13

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materi lain yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.²¹

Para ulama ahli faraidh banyak yang memberikan definisi tentang ilmu faraidh atau fiqh mawaris. Walaupun definisi-definisinya secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama: Hasby Ash-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

عِلْمٌ يَعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

Artinya: Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.²²

Kewarisan adalah berpindahnya hak milik seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi 'aqad lebih dahulu. Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang, diatur dalam kewarisan.²³

Seperti yang sudah disebutkan di atas, harta yang ditinggalkan si mayyit secara otomatis akan menjadi benda warisan, dan hukum waris berlaku pada saat itu juga yang mana akan mengatur pembagian benda warisan tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 disebutkan: Hukum

²¹ Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 39

²² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. cit.*, hal. 14

²³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu *faraid* atau fiqh mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan.

B. Dasar - dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama Islam adalah nash atau teks yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa: 7).*

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.²⁴

Allah SWT juga berfirman dalam surat an-Nisa ayat 11 dan 12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهِ كَانَ عَلَىٰكُمْ حَكِيمًا ١١

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 11).

²⁴ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan'. Maksudnya ketika ada anak laki-laki dan anak wanita. Tapi jika yang ada hanya anak lakilaki, maka dia mendapatkan semua warisan, jika yang ada hanya anak perempuan, maka dia mendapatkan separohnya. Jika ada dua anak perempuan maka mereka mendapat dua pertiga bagian.

Firman Allah SWT ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa' : 12)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Al-Hadist

Adapun Hadist Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

a. Hadist Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَلُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَقُّ
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).²⁵

b. Hadist dari Imran Bin Hushain ra

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُشَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِ
ابْنِي مَاتَ فَمَالِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ

Artinya: dari Imran bin Hushain bahwasanya seorang laki-laki datang menghadap Nabi saw. Dan berkata: cucu laki-laki saya telah meninggal dunia, apa yang dapat untuk saya dari harta peninggalanya. Nabi menjawab: untuk mu seperenam".²⁶

c. Hadist dari Usamah bin Zaid ra

عَنْ اسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi saw bersabda: seorang muslim tidak menerima hak kewarisan dari non muslim dan yang non muslim tidak menerima hak kewarisan dari seorang muslim.²⁷

²⁵ Sunan Tirmidzi, *Sunan Tirmidz jilid 4*, (Beirut: Dar al-Fiqri: 2005), h. 31

²⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th) h. 109

²⁷ Abu Daud, Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sajastamiy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-fikr, 1994), h. 15

C. Asas - asas Waris

Adapun asas-asas waris dalam Islam adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.²⁸

1. Asas *Ijbari*

Kata *ijbari* secara etimologi mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan harta tersebut. Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusiapun yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

Asas *ijbari* ini terdapat dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 7 yang menjelaskan tentang bagian seorang anak laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua atau karib kerabatnya, kata nasib berarti bagian atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain, disadari atau tidak disadari telah terdapat hak ahli waris dan bahkan sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT sebagaimana firmanNya :

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa: 7).*

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu. Asas bilateral ini dapat secara nyata yang terdapat dalam firman Allah surat An-Nisa: 4, 7, 11-12 dan 176. Dari ayat-ayat tersebut terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), keatas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan perempuan, inilah yang dinamakan asas bilateral.²⁹

3. Asas Individu

Asas individual adalah setiap ahli waris (individual) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa harus terikat kepada ahli waris lainnya, dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut

²⁹ Amir Syarifuddin, *ibid* . h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paut sama sekali dengan bagian yang diperoleh tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya. Ketentuan asas individual ini dinyatakan di dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.³⁰

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dari pengertian di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan secara hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam, artinya sebagaimana laki-laki, perempuanpun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Di dalam al-Quran diterangkan tentang kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudara laki-laki dan saudara perempuan.³¹

5. Asas Akibat Kematian

Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan karena adanya kematian. Dengan

³⁰ Amir Syarifuddin, h. 25

³¹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun dia berhak untuk mengatur hartanya, hal tersebut sematamata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia. Dengan demikian hukum kewarisan Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang dikenal dengan pewarisan secara *ab intestato* dan secara *testamen*. Memang di dalam ketentuan hukum Islam dikenal juga istilah wasiat, namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.³²

D. Rukun dan Syarat Waris

1. Rukun waris

Rukun waris ada tiga, yaitu:

a. Tirkah

Secara etimologi segala sesuatu yang ditinggalkan. Menurut Hanafiyah harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggal pewaris berupa harta benda dan hak.³³ Hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan yang wajib ditunaikan adalah:

- 1) Biaya perawatan jenazah yaitu segala beban biaya yang digunakan merawat jenazah, mulai dari saat meninggal sampai selesai penguburan.

³² Suhrawardi K Lubis, dkk, *op.cit.*, h. 32

³³ Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah, juz III*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2006), h. 1004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Hutang (*al-dain*) yaitu suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima atau kewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan. Hutang tersebut dilunasi dari harta peninggalan pewaris. Hutang dapat diklasifikasikan pada dua macam, yaitu dain Allah yaitu kewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan misal membayar zakat, kafarat dan hutang kepada manusia.

3) Wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela kepada orang lain ditangguhkan sampai terjadi peristiwa kematian orang yang berwasiat

- b. *Muwaris* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan
- c. *Warris* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan.³⁴

2. Syarat waris

Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun syarat pembagian warisan ada tiga, yaitu:

- a. Matinya *Muwaris* (orang yang mewariskan) benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukum) atau secara *taqdiriy* berdasarkan perkiraan.

1) Mati *haqiqiy*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.

³⁴ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mati *hukmiy*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.
- 3) Mati *taqdiri*, yaitu anggapan ataupun perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang kemedan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabarnya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.³⁵

E. Sebab Mendapatkan Waris

Sebab-sebab mendapat warisan yang terdapat di dalam al-Quran, faktornya ada tiga, yakni: hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan (keturunan), dan hubungan *wala'*.

1. Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan adalah suami-istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan aqad perkawinan secara sah. Dengan demikian,

³⁵ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami dapat menjadi ahli waris dari istrinya. Demikian pula sebaliknya, istri dapat menjadi ahli waris dari suaminya. Dalam Surat An-Nisa' ayat 12 Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa: 12).

Perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila aqad nikah yang telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan serta bebas dari halangan perkawinan. Yang dikatakan halangan perkawinan adalah sesuatu yang dapat menyebabkan batal atau tidak berlangsungnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan. Dalam hal ini, halangan dimaksudkan adalah larangan kawin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena hubungan darah. Oleh karena itu, aqad perkawinan yang tidak sah dalam segala bentuknya, tidak akan menyebabkan adanya peristiwa dalam hubungan kewarisan. Akan tetapi masih perlu dicatat bahwa pewarisan karena hubungan perkawinan akan berlaku, sepanjang suami atau istri yang wafat masih dalam batas-batas kewajaran, yakni ia masih dalam talaq *raj'i* dan ahli waris antara keduanya masih ada.

2. Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan merupakan sebab pewarisan karena kelahiran, suatu unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun (cabang) dari si mati (*furu'ul mayyit*), leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mati (*ushulul mayyit*), atau keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping (*al-hawasyi*). Mereka yang memiliki ikatan kekerabatan dengan si mati, sebagai sebab dalam menerima harta peninggalan, adalah bapak dan ibu, anak-anak, dan orang-orang yang bernasab kepada mereka.

3. Hubungan *Wala'*

Wala' yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Penyebabnya adalah karena tuannya telah memberikan kebebasan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak

mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.³⁶

F. Sebab Halangan Menerima Waris

Dalam hukum waris Islam ada beberapa hal yang dapat menjadikan penghalang hak waris antara lain:

1. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (seorang anak membunuh bapaknya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Sebagaimana hadits Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْقَا تِلْ لَا يَرِثُ (رواه الترمذی)

Artinya: *Dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. bersabda:*

Pembunuh tidak boleh mewarisi. (HR. Abu dawud dan Ibnu majah).³⁷

2. Budak

Seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan bertindak atau

³⁶ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 9

³⁷ Tirmizi, Abi Isa Muhammad, Jami'al-Shaheh, *Sunan al Tirmizi, juz IV*, (Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyah, 295 H), h. 370

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat menjadi subyek hukum dan status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus, karena menjadi keluarga asing.³⁸

3. Perbedaan Agama

Perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ اسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: *Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi saw bersabda: seorang muslim tidak meneria hak kewarisan dari non muslim dan yang non muslim tidak menerima hak kewarisan dari seorang muslim.*³⁹

4. Murtad

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penghalang hak waris, yakni murtad. Dalam hal ini ulama sepakat karena murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.

G. Macam-Macam Ahli Waris

Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab atau

³⁸ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 110

³⁹ Abu Daud, *loc.cit.*, h. 15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan, perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam.⁴⁰ Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: Ahli waris *Sababiyah* dan ahli waris *Nasabiyah*. Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: ahli waris *ashab al furud*, ahli waris *'asabah*, ahli waris *dhawi al arham*.⁴¹

1. Ahli waris *nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *muwarith* berdasarkan hubungan darah. Ahli waris *nasabiyah* ini terdiri dari 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Ahli waris laki-laki berdasarkan urutan kelompoknya sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah
- c. Bapak
- d. Kakek dari bapak
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- j. Paman dari saudara ayah sekandung
- k. Paman seayah
- l. Anak laki-laki paman sekandung

⁴⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. Anak laki-laki paman seayah

Sedangkan ahli waris dari golongan perempuan yaitu:

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan garis laki-laki
- c. Ibu
- d. Nenek garis bapak
- e. Nenek garis ibu
- f. Sudara perempuan sekandung
- g. Sudara perempuan seayah
- h. Saudara perempuan seibu.⁴²

2. Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan pewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu :

- a. Sebab perkawinan, yaitu suami atau istri
- b. Sebab memerdekakan hamba sahaya Sebagai ahli waris *sababiyah*, mereka dapat menerima warisan apabila perkawinan suami istri tersebut sah. Begitu juga hubungan yang timbul sebab memerdekakan hamba sahaya, hendaknya dibuktikan menurut hukum yang berlaku.⁴³

3. Ahli Waris *sabab al furud*

Pada penjelasan di bawah ini tidak dipisahkan lagi antara ahli waris *nasabiyah* dengan ahli waris *sababiyah*. Pertimbangannya mereka sama-sama sebagai *ashab al furud*. Pada umumnya *ashab al furud* adalah

⁴² *Ibid.*, h, 50

⁴³ *Ibid.*, h, 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, sementara ahli waris laki-laki yang menerima bagian tertentu adalah bapak, kakek dan suami. Selain itu akan mendapat bagian sisa ('*asabah*').⁴⁴

4. Ahli waris '*asabah*

'*Asabah* adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al furud* sebagai penerima bagian sisa. Ahli waris '*asabah* terkadang menerima bagian banyak, terkadang juga menerima bagian sediki, ada juga yang tidak menerima sama sekali karena harta warisannya telah habis dibagi oleh *ashab al furud*.

Adapun macam-macam ahli waris '*asabah* ada tiga macam, yaitu :

- a. '*Asabah bi an nafsi*, yaitu semua orang laki-laki yang berkaitan keturunannya kepada pewaris tanpa adanya selingan perempuan. Mereka mewarisi berdasarkan diri mereka yang sangat dekat keturunannya dengan pewaris, tanpa memerlukan orang lain agar dapat waris secara ushubah.
- b. '*Asabah bi al ghoir*, yaitu kelompok ahli waris perempuan yang membutuhkan ahli waris lain untuk menjadikannya menjadi *ashobah* dan berserikat dalam menerima *ashobah*.
- c. '*Asabah ma' al ghoyr*, yaitu kelompok ahli waris perempuan yang membutuhkan ahli waris lain untuk menjadikannya *asabah* tetapi tidak berserikat atau bersama dalam menerima *ushuba*.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid.*, h, 57

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ahli Waris *dhawi al arham*

Ahli waris *dhaw al arham* ahli waris yang tidak termasuk ahli waris *ashabul furud* dan ahli waris '*asabah*, mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya.⁴⁶

H. Bagian-Bagian Waris

Adapun bagian-bagian penerima waris yaitu:⁴⁷

1. Suami
 - a. $\frac{1}{2}$ apabila tidak ada anak atau cucu, baik laki-laki atau perempuan.
 - b. $\frac{1}{4}$ apabila ada anak atau cucu, baik laki-laki atau perempuan.
2. Istri
 - a. $\frac{1}{4}$ apabila tidak ada anak atau cucu.
 - b. $\frac{1}{8}$ apabila bersama anak atau cucu
3. Anak perempuan
 - a. $\frac{1}{2}$ apabila seorang diri dengan syarat tidak ada anak laki-laki.
 - b. $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih tanpa anak laki-laki.
4. Cucu perempuan
 - a. $\frac{1}{2}$ apabila seorang diri dan tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki.
 - b. $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih tanpa cucu laki-laki.
 - c. $\frac{1}{6}$ berapapun jumlahnya kalau bersama anak perempuan, (dalam hal ini cucu perempuan dianggap melengkapi bagian anak perempuan yang $\frac{2}{3}$ disebut istilah dengan *تكملة لثلاثي*)

⁴⁶ *Ibid.*, h, 59

⁴⁷ *Ibid.*, h, 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Asabahbil ghair*. Berapapun jumlah cucu perempuan, jika bersama dengan cucu laki-laki, maka ia mendapatkan bagian *ashabah* (sis) dengan syarat: tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih dekat dengan mayit, ketentuan pembagian *ashabah* adalah 2: 1,2 untuk cucu laki- laki, 1 untuk cucu perempuan.
- e. Mahjub apabila bersama anak atau cucu laki-laki yang lebih dekat dengan mayit, atau bersama dengan dua orang anak perempuan.
5. Ayah
 - a. $\frac{1}{6}$ di tambah sisa apabila bersama dengan anak atau cucu perempuan dan tidak ada anak atau cucu laki-laki.
 - b. $\frac{1}{6}$ apabila bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki.
 - c. *Asabah* apabila tanpa anak atau cucu sama sekali.
6. Ibu
 - a. $\frac{1}{6}$ apabila tidak ada anak atau cucu atau 2 orang saudara atau lebih.
 - b. $\frac{1}{6}$ apabila bersama anak atau cucu atau dua orang saudara atau lebih
 - c. $\frac{1}{3}$ sisa apabila bersama suami/istri dan ayah (jadi ahli waris hanya terdiri dari suami/istri, ayah dan ibu)
7. Saudari kandung
 - a. $\frac{1}{2}$ apabila seorang diri dengan syarat: tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki atau ayah atau anak perempuan atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung.
 - b. $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih tanpa saudara kandung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Asabahbil ghair* apabila bersama saudara laki- laki kandung, dengan syarat tidak ada anak atau cucu lakilaki atau ayah.
 - d. *Asabahma'al ghair* apabila bersama anak perempuan atau cucu perempuan dengan syarat: tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah atau saudara laki-laki kandung.
 - e. Mahjub apabila bersama ayah, atau anak laki-laki atau cucu laki-laki.
8. Saudara perempuan seayah
- a. $\frac{1}{2}$ apabila seorang diri tanpa saudara laki-laki seayah.
 - b. $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih tanpa saudara seayah.
 - c. $\frac{1}{6}$ berapapun jumlahnya bersama saudara perempuan kandung atau saudara laki-laki seayah.
 - d. *Asabahbil ghair* apabila bersama saudara laki-laki seayah, dengan syarat: tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung yang menjadi *ashabah ma'al ghair*.
 - e. *Asabahma'al ghair* apabila bersama anak atau cucu perempuan yang menerima waris tanpa saudara lakilaki seayah.
 - f. *Mahjub* apabila ada ayah, anak laki-laki, saudara kandung, dua orang atau lebih saudari kandung kandung, saudari kandung yang menjadi *ashabah ma'al ghair*.
9. Saudara / saudari seibu
- a. $\frac{1}{3}$ apabila lebih dari seorang tanpa *far'ul* waris, ayah, maupun kakek, dan bagiannya berbanding sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. $\frac{1}{6}$ apabila seorang tanpa far'ul waris, ayah atau kakek.
- c. *Mahjub* apabila bersama anak atau cucu yang menerima waris, ayah, kakek, dan seterusnya.

Masalah *musytarikah* atau *musyarakah* yaitu apabila saudara kandung dan saudari kandung sebagai *ashabah* tidak mendapat bagian karena telah terbagi habis oleh *ashabul furud* yang di antaranya adalah dua orang atau lebih saudara seibu. Dalam hal ini saudara dan saudari kandung berserikat (bergabung) dengan saudara seibu berbagi sama terhadap bagian yang sepertiga.

10. Kakek

Ada dua pendapat tentang bagian kakek yaitu:

- a. Mengganti kedudukan ayah
- b. Kedudukannya sama dengan saudara, dengan alasan yang menghubungkan mayit dengan kakek atau dengan saudara adalah ayah, namun pada hakikatnya kakek tidak pernah memahjubkan saudara tetap bagian kakek lebih banyak.
- a. Kakek tidak bersama saudara kedudukannya sama dengan ayah.
 - 1) $\frac{1}{6}$ apabila tanpa anak atau cucu laki-laki
 - 2) $\frac{1}{6}$ sisa apabila bersama anak atau cucu perempuan tanpa anak atau cucu laki-laki
 - 3) *Asabah* apabila tanpa anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kakek bersama saudara

- 1) Apabila bersama saudara dan saudari kandung, kakek mengambil bagian terbanyak, $\frac{1}{6}$ atau berbagi sama sebagai *ashabah* disebut *al muqasamah*
- 2) Apabila bersama saudari kandung atau seayah dan anak perempuan atau cucu perempuan (*Asabahma'al ghair*), maka:
 - a) Diberikan lebih dulu bagian anak atau cucu perempuan
 - b) Sisanya kakek mengambil yang terbanyak $\frac{1}{6}$ atau berbagisama (*al muqasamah*). Dalam hal ini bagian kakek dua kali bagian saudari.
- 3) Apabila tanpa anak atau cucu bersama saudari kandung atau seayah, maka kakek mengambil yang terbanyak sebagai *ashabah* atau seperenam (kakek dua kali bagian saudari).

11. Nenek

- a. $\frac{1}{6}$ apabila seorang tanpa ibu, atau lebih dari seorang dengan syarat sama hubungannya dengan mayit atau nenek yang dekat dari bapak bersama nenek yang jauh dari ibu.
- b. *Mahjub* apabila bersama ibu. Demikian juga nenek yang dekat dari ibu dapat menghalang nenek yang jauh dari bapak/ dari ibu dan nenek yang dekat dari bapak dapat menghalangi nenek yang jauh dari bapak saja.

I. Wasiat

Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintah dan lain-lain.⁴⁸ Menurut syara' wasiat adalah mendemakan suatu hak yang pelaksanaannya dikaitkan sesudah orang yang bersangkutan meninggal dunia.⁴⁹

Wasiat artinya pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.

Proses kewarisan semasa hidup atau pada saat pewaris meninggal dunia, berbeda dengan pewarisan secara hibah wasiat. Kadang –kadang seorang pewaris dihadapan para ahli warisnya menyatakan bahwa bagian tertentu dari harta peninggalannya itu diperuntukkan bagi ahli waris tertentu.

Kadang- kadang wasiat itu dibuat secara tertulis melalui perantara seorang notaris . Menurut Soepomo, meskipun hibah wasiat itu berbentuk akte-notaris, sah atau tidaknya isi hibah wasiat itu dikuasai oleh hokum adat.⁵⁰

J. Pengertian Urf (Adat)

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa arab “ *al- adah* ” yang artinya “ kebiasaan “, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi.⁵¹

Secara etimologi, *al- 'urf* berasal dari akar kata '*arafa*, ya '*rifu* yang berarti “ sesuatu yang dikenal, dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.

⁴⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 131

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, hal. 343

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *opcit*, hal. 272

⁵¹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia : Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2013), hal. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Al- ‘urf menurut bahasa juga memiliki arti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, diterima oleh pikiran yang sehat.⁵²

Sedangkan secara terminologi, ‘urf ialah “ sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam unsur – unsurnya”.⁵³

‘Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat.⁵⁴

‘Urf jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan – kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia. ‘Urf dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat.

⁵² A Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hal. 77

⁵³ Amir Syarifuddin, *Garis- garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2012), hal. 71

⁵⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 133

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Batak Toba hanya di peruntukkan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan tersebut. Karena anak perempuan di anggap akan mendapatkan warisan bila sudah besar dan telah menikah, maka dari pihak suaminya lah anak perempuan tersebut akan mendapatkan warisan.
2. Berdasarkan hasil penelitian tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena pembagian harta warisan menurut adat Batak Toba sangat bertentangan sekali dengan hukum Islam yang di jelaskan di dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 11 dan 12.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba dengan melihat kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Batak Toba agar tidak melakukan diskriminasi terhadap hak perempuan dalam menerimana warisan.

2. Kepada tokoh-tokoh masyarakat Batak Toba agar dapat meninjau kembali adat mereka dalam pembagian harta warisan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Abu Daud, Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sajastamiy, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-fikr, 1994
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.th
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- A Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970
- Amir Syarifuddin, *Garis- garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2012
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia : Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2013
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Rafika Aditama, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran, Jilid 5*, Penerjemah: Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa warisan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002
- Parman Ali, *Kewarisan dalam Al qur'an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah, juz III*, Beirut: Dar al- Fikr, 2006
- Sirman Dahwal, *Hukum Kewarisan Indonesia yang di Cita-Citakan*, Bandung: Mandar Maju, 2020
- Soerjono soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Mawaris)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997
- Sunan Tirmidzi, *Sunan Tirmidz jilid 4*, Beirut: Dar al-Fiqri: 2005
- Tirmizi, Abi Isa Muhammad, Jami'al-Shaheh, *Sunan al Tirmizi, juz IV*, Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyah, 295 H



LAMPIRAN

Wawancara informasi I

Informasi : Yati Simanjuntak

Tanggal : 23 September 2020

Lokasi : Desa Sumber Sari

1. Bagaimana cara pembagian harta warisan dalam adat batak toba ?

Jadi begini didalam adat batak mengenai harta warisan itu jatuh pada anak laki-laki, karena adat batak menganut sistem patrilineal (garis keturunan bapak), dimana anak laki-laki lah yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Dengan alasan karena anak laki-laki lah yang membawa nama bapak nya. Sedangkan anak perempuan tidak berhak atas harta warisan dari orang tua nya, hal ini disebabkan karena anak perempuan itu di *tuhor* (beli) oleh laki-laki lain (menikah dengan laki-laki lain).

2. bagaimana cara pembagian harta warisan dalam adat batak tersebut ?

Dalam masalah pembagian harta warisannya, anak laki-laki yang berhak mendapatkannya, sedangkan anak perempuan tidak. Pembagian nya dengan cara dibagi rata, berapa harta yang dimiliki pewaris maka harta itulah yang akan dibagikan secara merata, sedangkan rumah itu jatuh kepada anak laki-laki yang paling kecil atau disebut juga dengan anak *siappudan* nya .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Informasi II

Informasi : Ety Marianna Siregar

Tanggal : 25 Maret 2021

Lokasi : Desa Sumber Sari

1. Bagaimana pembagian harta warisan dalam adat batak toba ?

Pada masyarakat Batak Toba dalam pembagian harta warisan selalu berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku yaitu berdasarkan garis keturunan ayahnya, yang mana anak laki-laki yang akan mendapatkan harta waris yang ditinggalkan sedangkan anak perempuannya tidak mendapatkan harta waris, karena masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal.

Wawancara Informasi III

Informasi : Bapak Latus Sirait, Toko Adat Batak

Tanggal : 30 Maret, 2021

Lokasi : Desa Sumber Sari

1. Bagaimana Adat budaya Batak ?

zaman dahulu suku Batak semua itu hanya mempunyai satu nenek moyang saja dan dia itu si Raja Batak. Terus mengenai budaya Batak terkhususnya Batak Toba mempunyai prinsip *Dalihan Na tolu*. Dalam Adat Batak Toba yang sangat terkait dengan budaya Batak yaitu, bahasa, pola perkampungan, bentuk rumah, kepercayaan, konsepsi tentang pencipta, konsep tentang roh, sistem kekerabatan, mata pencaharian, dan sistem kesenian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pembagian harta warisan dalam adat batak toba apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan tersebut ?

Apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan tersebut maka dilakukan dengan cara berdamai atau musyawarah. Didalam adat batak toba ada beberapa cara dalam penyelesaian suatu masalah termasuk dalam harta warisan.

- a) *Marhata* (Musyawarah keluarga)
- b) Lembaga Adat (*Dalihan Na tolu*), apabila musyawarah dalam keluarga tidak ada kesepakatan atau belum terselesaikan.

DOKUMENTASI



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ADAT BATAK TOBA (Studi kasus di Desa Sumber Sari) ”**, yang ditulis oleh:

Nama : **HOTMA IDA Br. SIMAMORA**
NIM : **11721200647**
Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, M.A

Sekretaris
Mutasir, M.Sy

Penguji I
Dr. Aslati, M.Ag

Penguji II
Drs, Arifuddin, M.Ag

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jahnus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

Un.04/F.I/PP.00.9/2951/2021

Pekanbaru, 16 Maret 2021

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:HOTMA IDA BR. SIMAMORA
NIM	:11721200647
Jurusan	:Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	:VIII (Delapan)
Lokasi	:Desa Sumber Sari

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul :TINJAUAN HUKUK ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN DALAM
ADAT BATAK TOBA

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Disampaikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40744
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2951/2021 Tanggal 16 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

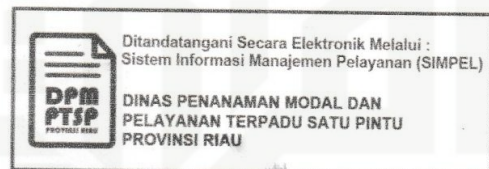
1. Nama	: HOTMA IDA BR. SIMAMORA
2. NIM / KTP	: 11721200647
3. Program Studi	: HUKUM KELAURGA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ADAT BATAK TOBA
7. Lokasi Penelitian	: DESA SUMBER SARI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 April 2021

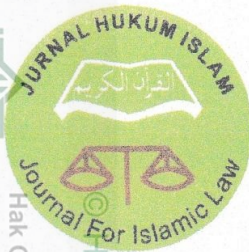


Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kalimantan Timur
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : HOTMA IDA Br. SIMAMORA
NIM : 11721200647
JURUSAN : HUKUM KELUARGA
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ADAT BATAK TOBA(Study Kasus Desa Sumber Sari)

Pembimbing: Ade Fariz Fakhrrullah, M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

👤 Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU